

KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA ERA GLOBALISASI, PASAR BEBAS DAN REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Muhammad Nur Asmawi

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Jalan Diponegoro No. 23 Palu

e-mail: abaayyad74@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang kebijakan pendidikan Islam pada era globalisasi, pasar bebas dan revolusi industri 4.0. Sebuah era baru yang menekankan pada pola *digital economy*, *artificial intelligence*, *big data*, *robotic*, dan sebagainya atau dikenal dengan fenomena *disruptive innovation*. Tulisan ini berusaha mengungkap tentang pergeseran fungsi pendidikan kontemporer ke arah pendidikan sebagai *profit oriented*. Perubahan social ini disikapi oleh pemerintah dengan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik dengan hadirnya, antara lain: Kurikulum 2013, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), *e-learning*, *cyber University* dan sebagainya untuk menjawab tantangan era globalisasi yang ditandai dengan pasar bebas dan revolusi industri 4.0

Abstract:

This article examines Islamic education policies in the era of globalization, free markets and industrial revolution 4.0. A new era that emphasizes the pattern of digital economy, artificial intelligence, big data, robotic, and so on, or known as the disruptive innovation phenomenon. This paper seeks to reveal the shift in the function of contemporary education towards education as profit oriented. These social changes are addressed by the government with educational policies as public policies with their presence, among others: Kurikulum 2013, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), e-learning, cyber University and so on to answer the challenges of the globalization era characterized by free markets and industrial revolutions 4.0.

Kata Kunci: Globalisasi, Kebijakan Pendidikan

PENDAHULUAN

Menjadi sebuah keniscayaan bahwa setiap manusia dalam masyarakatnya akan mengalami banyak perubahan. Perubahan itu dapat berlangsung secara cepat maupun lambat, dan memerlukan proses yang lama. Oleh karenanya perubahan sosial merupakan proses yang berkesinambungan. Penelaahan mengenai proses tersebut mempunyai perspektif sejarah maupun evolusioner. Perubahan-perubahan pada masyarakat dewasa ini dapat berlangsung secara terus menerus, tetapi perlahan-lahan tanpa direncanakan (*Unplanned sosial change*) seperti perubahan sosial yang disebabkan oleh perubahan dalam bidang teknologi atau globalisasi, selain itu, ada pula perubahan yang terjadi karena direncanakan (*Planned social Change*). (Ghufron Mustofa^{2013: 80-97}). Perubahan pada masyarakat tertuju pada struktur sosial, baik di dalam keluarga, lembaga lembaga keagamaan, sosial maupun politik.

Asumsi ini dapat dilihat bahwa proses terjadinya perubahan sosial di dalam masyarakat memerlukan adanya peran aktif dari para individu untuk membentuk dan mencetuskan ide-ide serta gagasan yang menuju terbentuknya tatanan yang semakin berkembang. Penekanannya adalah bagaimana individu beradaptasi terhadap perubahan sosial ini tergantung sejauh mana individu-individu memahami, mengerti serta mengikuti pada tatanan struktur sosial yang ada di masyarakat, baik secara cepat maupun lambat.

Perubahan sosial dapat dilihat dari sudut pendidikan, bahwa pada saat pendidikan yang masih bersifat tradisional memandang lembaga pendidikan sebagai salah satu dari struktur dan kebudayaan dalam suatu masyarakat. Di dalam pendidikan tradisional anak didik di tempatkan sebagai obyek dalam perubahan sosial, karenanya lembaga pendidikan yang tidak dapat mengikuti perubahan sosial, maka dapat kehilangan fungsi sebagai tempat mentransfer nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat dan kebudayaan, banyak

kemungkinan-kemungkinan akan ditinggalkan oleh masyarakat, sebab tidak dapat memberi jawaban akan tuntutan zaman yang semakin berkemabang. Sedangkan pendidikan modern menganggap seorang individu hanya dapat berkembang di dalam interaksinya dengan tatanan kehidupan sosial budaya dimana dia hidup. Artinya pendidikan modern menganggap anak didik tidak hanya sebatas objek dari perubahan sosial melainkan anak didik juga sebagai pelaku dari perubahan sosial, dimana adanya pengakuan peran aktif partisipatif dalam proses perubahan sosial tersebut. (Ghufron Mustofa: 2013: 80-97)

Dengan demikian ada perbedaan pandangan antara pendidikan tradisional dengan pendidikan modern, yang melihat anak didik tidak hanya sebatas makhluk yang aktif reaktif, yang berusaha meyongsong dan melakukan perubahan-perubahan di sekelilingnya. Sebab pendidikan yang berlangsung selama ini ditempatkan pada garda depan sebagai sarana perubahan sosial, pada dasarnya jika kita melihat adanya perubahan pada komponen tertentu dalam masyarakat itu, jika salah satu lembaga sosial berubah maka yang lainnya juga akan ikut terpengaruh. Perubahan sosial yang berkembang di masyarakat mencakup berbagai aspek mendukung terciptanya sebuah keserasian hidup, bahwa pada perkembangannya muncul dua aliran perubahan sosial (*social change*), yang pertama aliran sinkronis melihat perubahan sosial secara *cross-section*, terlepas dari perkembangan dalam waktu dan sifatnya statis, yang kedua pandangan modern yaitu pandangan diakrinik, pendekatan ini melihat kenyataan sosial bukan sesuatu yang statis, tetapi merupakan suatu proses.

Perubahan sosial secara garis besar merupakan suatu perubahan pola kelakuan, hubungan sosial, institusi-institusi dan struktur sosial dalam waktu tertentu. Perubahan selalu mengalami sebuah kapasitas, perubahan sosial (*social change*) yang pertama kali dikembangkan oleh William F. Ogburn, dalam bukunya yang berjudul *Social Change* membicarakan konsep-konsep evolusi sosial serta peranan faktor-faktor biologis dan kebudayaan terhadap perubahan sosial. (William Fielding Ogburn: 2018)

Selain itu, tulisan ini juga berdasar pada teori tentang kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik dengan rumusan: kebijakan publik adalah : keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal,

memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan. (H.A.R. Tilaar: 1998: 185)

Dalam pemahaman ini, istilah “keputusan” termasuk juga ketika pemerintah memutuskan untuk “tidak memutuskan” atau memutuskan untuk “tidak mengurus” isu terkait. Dengan demikian, pemahaman ini mengacu pada pemahaman Thomas R Dye, bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah.

PEMBAHASAN

Sejak lahirnya Revolusi Industri di Eropa, peranan pendidikan dalam masyarakat semakin meningkat. Ia menjadi salah satu institusi penting dalam sistem sosial masyarakat modern yang berbasis industri. Durkheim dalam Nanang Martono menyatakan bahwa dalam sistem masyarakat industri, pendidikan memiliki peran dan fungsi menopang keberlangsungan kegiatan industri di masyarakat. Menurutnya, pendidikan berperan untuk membekali masyarakat dengan berbagai keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. (Nanang Martono, 2014). Oleh karena itu, tulisan ini membahas kebijakan pendidikan pada era globalisasi, pasar bebas dan revolusi industri 4.0.

Kebijakan Pendidikan Islam pada Era Globalisasi

Globalisasi, menurut Anthony Giddens sebagai proses yang berjalan dengan kecepatan tinggi yang tidak seorang pun dapat mengendalikannya. Globalisasi kata Giddens, merupakan dunia yang lepas kendali (*Runaway word*) Ibarat sebuah truk besar (*Juggernaut*) yang meluncur tanpa kendali dan tidak seorang pun dapat menahan laju truk besar yang bernama globalisasi ini. (Anthony Giddens, 1999: 19)

Dengan meminjam istilah Alvin Tofler, globalisasi merupakan “kejutan masa depan” (*future shock*) untuk menggambarkan situasi yang membuat manusia terlempar pada suatu kondisi dimana tekanan yang guncangan dan disorientasi yang disebabkan oleh hadirnya perubahan dalam waktu yang terlalu singkat.

Era globalisasi dicirikan dengan: Pertama, abad ini adalah abad yang mengedepankan ilmu pengetahuan sebagai handalan manusia untuk memecahkan problem kehidupannya, dengan demikian abad ini akan melahirkan masyarakat belajar (*learning society*) atau masyarakat ilmu pengetahuan (*knowledge society*). Keunggulan manusia atau suatu bangsa akan dikaitkan dengan

keunggulan bangsa tersebut dalam bidang ilmu pengetahuan. *Kedua*, di era ini muncul dunia tanpa batas (*borderless world*). Sekat-sekat geografis menjadi semu sebagai akibat dari kemajuan ilmu komunikasi dan informasi. Peristiwa apapun yang terjadi di suatu belahan dunia dalam waktu yang hampir bersamaan akan diketahui di belahan dunia lainnya, maka terjadilah pertukaran informasi secara mudah. *Ketiga*, era ini akan memunculkan persaingan global, akan muncul era kompetitif. Untuk menyaingi era kompetitif ini, maka memiliki keunggulan menjadi sebuah keniscayaan. (Haidar Putra Daulay, 2015: 13)

Menyikapi globalisasi, ketika dikaitkan dengan pendidikan Islam, setidaknya ada tiga kelompok yang menyatakan sikapnya terhadap globalisasi. Kelompok pertama, para *globalis*, mereka meyakini bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi nyata terhadap bagaimana orang dan lembaga di seluruh dunia berjalan. Mereka percaya bahwa negara-negara dan kebudayaan lokal akan hilang diterpa kebudayaan dan ekonomi global yang homogen.

Kenyataan para *globalis* ini akan sangat berdampak bagi hubungan sosial masyarakat ditingkat lokal yang secara alamiah akan terhegemoni oleh arus budaya barat yang cenderung lebih kuat dan berbeda dengan tradisi ketimuran. Perubahan yang berlangsung secara cepat dan drastis menyebabkan banyak orang gagal menyesuaikan diri. Akibatnya, muncullah berbagai bentuk kekerasan sosial yang dapat mempergunakan simbol-simbol kemanusiaan, politik, ekonomi bahkan juga simbol keagamaan.

Kelompok kedua, pihak yang acuh, sekaligus menolak konsep globalisasi mereka yang biasa disebut sebagai „kaum tradisional”. Kaum tradisional tidak percaya bahwa globalisasi tengah terjadi. Mereka berpendapat bahwa fenomena ini adalah sebuah mitos semata, atau jika memang ada, terlalu dibesar-besarkan. Mereka merujuk bahwa kapitalisme telah menjadi sebuah fenomena internasional selama ratusan tahun. Apa yang tengah terjadi saat ini hanyalah merupakan tahap lanjutan atau evolusi dari produksi dan perdagangan kapital. Mereka menganggap bahwa globalisasi akan merusak sendi-sendi budaya Islam yang telah mereka jaga selama bertahun-tahun. Kekhawatiran mereka terletak pada “*westernisasi*” dan pembaratan pada budaya setempat melalui arus globalisasi, pelemahan kedaulatan nasional, akan tergerus oleh kekuatan super power, hilangnya identitas budaya nasional dan timbulnya eksploitasi terhadap negara berkembang.

Kelompok ketiga, adalah kelompok pertengahan yakni yang menyikapinya secara proporsional, menurut Yusuf al-Qardhawi, inilah sikap yang baik sebagai cermin sebagai manhaj Islam pertengahan. Dengan melihat ketiga sikap di atas dapat dimengerti bahwa globalisasi harus dimaknai secara benar dan proporsional terutama menyangkut pendidikan Islam.

Salah satu bentuk globalisasi dapat diamati dengan adanya perdagangan bebas dalam berbagai lini sosial, tidak terkecuali aspek pendidikan. Pendidikan seperti tidak lagi murni mengusung misi transfer keilmuan serta penanaman etika kepada peserta didik, namun mengalami perluasan fungsi sebagai alat strategis dalam meraup keuntungan (*profit oriented*) dengan menawarkan sistem mutakhir dengan biaya pendidikan yang cukup mahal. (Arif Shaifudin, 2016: 3)

Globalisasi merupakan sebuah fenomena kompleks dan efek domino atas laju modernitas yang memiliki efek luas terhadap semua dimensi kehidupan umat manusia. Tidak mengherankan, jika istilah, “globalisasi” ini telah memperoleh konotasi arti yang cukup banyak. Di satu sisi, globalisasi dipandang sebagai kekuatan yang tidak tertahankan serta jinak untuk memberikan kemakmuran ekonomi kepada orang-orang di seluruh dunia. Di sisi lain, ia dituding sebagai sumber dari segala penyakit kontemporer yang mematikan identitas budaya setiap bangsa. Dua sisi berbeda yang melekat pada globalisasi ini menjadi perhatian serius berbagai bangsa dalam mempertahankan karakter budayanya melalui dunia pendidikan.

Azyumardi Azra, 1995: 55 mengungkapkan pendidikan Islam merupakan pendidikan manusia seutuhnya, akal dan ketrampilan dengan tujuan menyiapkan manusia untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Namun hal itu tidak berjalan dengan lurus, karena pendidikan Islam dipengaruhi oleh arus globalisasi yang terjadi saat ini. Globalisasi merupakan ancaman besar bagi pendidikan Islam untuk mempertahankan nilai-nilai agama yang murni.

Pendidikan Islam dizaman ini menghadapi tantangan-tantangan yang serius untuk tetap eksis di dunia pendidikan. Hal ini tidak terlepas dari hilangnya batas-batas ruang dan waktu antara satu negara dengan negara yang lain sebagai dampak dari globalisasi.

Haidar Putra Daulay mengemukakan bahwa diantara tantangan serius yang dihadapi oleh pendidikan Islam pada era globalisasi ini adalah: *pertama*, orientasi dan tujuan pendidikan. *Kedua*, pengelolaan (managemen)sistem iniyang akan

mempengaruhi dan mewarnai kebijakan yang diterapkan dalam sebuah lembaga pendidikan. *Ketiga*, hasil (*output*) bagaimana sebuah produk yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan dapat dilihat dari kualitas luaran (*output*-nya) (Haidar Putra Daulay, 2009: 59) Berbicara tentang peluang pendidikan Islam di era globalisasi, pemerintah selaku pembuat kebijakan pendidikan juga telah memberikan respon positif terhadap eksistensi pendidikan Islam. Di antaranya dengan membuat kebijakan berupa perumusan kurikulum yang baru yaitu kurikulum 2013. Dalam kurikulum tersebut porsi dari pendidikan agama ditambah dari pada sebelumnya.

Ada beberapa perubahan mendasar pada kurikulum 2013, diantara perubahan tersebut adalah pada standar kompetensi lulusan (SKL) yang merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang terdiri dari beberapa aspek yakni, aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Kompetensi Lulusan pada setiap jenjang dikembangkan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan kompetensi. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) menjadi acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan dan beberapa standar lainnya.

Pada aspek sikaplah kemudian semua bermuara. Dalam aspek sikap, standar kompetensi lulusannya adalah bagaimana peserta didik memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain.

Kurikulum 2013 memiliki semangat yang kuat dalam konteks spiritualitas. Apakah kurikulum 2013 akan berhasil menciptakan generasi yang berakhlak? Jawabannya tentu pada sejauh mana pihak-pihak terkait mampu memahami dan mengimplimentasikannya. Ibarat membangun rumah, kurikulum 2013 merupakan blue printnya. Sebagai blue print harus jelas bagi semua pihak yang terkait, arsitek, tukang, pemilik rumah.

Kemudian UU No. 14 Tahun 2004 Tentang Guru dan Dosen yang menuntut terbinanya guru profesional yang ditentukan bukan semata-mata oleh ijazah formal, tetapi terutama oleh partisipasinya dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Dampak globalisasi dalam sistem pendidikan adalah terintegrasinya aspek pendidikan dan ekonomi. Ekspansi besar-besaran

teknologi dalam sistem pendidikan merupakan salah satu wujud integrasi ekonomi dalam dunia pendidikan. Indikator kualitas sistem pendidikan juga banyak menggunakan indikator ekonomi, ketika sekolah misalnya harus mengintegrasikan kepentingan pengguna (pelanggan-dalam bahasa ekonomi) dengan proses pembelajaran di sekolah. *Output* lembaga pendidikan harus menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Ini mengindikasikan bahwa orientasi kepada kepentingan pasar semakin menguat.

Gejala sosial ini semakin diperparah dengan berkembangnya neoliberalisme di berbagai negara. Dalam kendali neoliberalisme, sekolah harus memiliki mekanisme untuk dapat tetap *survive*. Mekanisme yang digunakan antara lain melalui komersialisasi dan marketisasi. Melalui kedua mekanisme ini, sekolah diharapkan mampu mendapatkan keuntungan agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat umum. Marketisasi pendidikan memberikan peluang pada setiap sekolah untuk melakukan persaingan secara terbuka yang merupakan ciri utama neoliberalisme. Prinsip kerja lembaga pendidikan mengikuti pola pasar: ada permintaan dan ada penawaran. Pada akhirnya, sekolah diposisikan sebagai sebuah komoditas.

Di Indonesia, gejala marketisasi dilihat dari sistem peragaman tipe sekolah. Sejumlah sekolah yang menawarkan tipe untuk mendapatkan perhatian siswa, di antaranya: tipe bilingual, sekolah internasional, sekolah unggulan, serta sebutan "sekolah favorit" di kalangan masyarakat. Beberapa waktu yang lalu pemerintah juga merintis pengembangan sekolah berstandar internasional (RSBI-Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) dan berstandar nasional (RSBN- Rintisan Sekolah Bertaraf Nasional) di sejumlah wilayah tanah air. Namun, awal 2012 tipe sekolah tersebut dihapus karena dianggap telah menyebabkan ketimpangan sosial. Hal ini disebabkan keberadaan tipe-tipe sekolah tersebut telah melahirkan perbedaan kesempatan belajar bagi si kaya dan si miskin.

Kebijakan Pendidikan Islam pada Era Pasar Bebas

Pasar bebas adalah sebuah bentuk pasar persaingan sempurna dimana penjual dan pembeli berjumlah banyak dan keduanya mengetahui informasi dengan baik, *free exit* dan *free entry*. Pada pasar sempurna, akan didapatkan harga pasar atau *market price* secara alami, atau dalam istilah Adam Smith sebagai *invisible hand*. Adam Smith dalam Arsy Afiana mendefinisikan sistem pasar bebas dengan sistem ekonomi yang

mewujudkan kegiatan ekonomi yang paling efisien dan kemakmuran masyarakat yang paling optimum, (Arsy Afiana, 2015: 21) dan mengisyaratkan adanya kompetisi bebas.

Kompetisi bebas di sini dapat diartikan bahwa semua orang akan dihadapkan kepada persaingan dan kompetisi yang bersifat terbuka. Siapa yang berhasil memenangkan persaingan atau kompetisi tersebut, merekalah yang akan dapat bertahan dan menjadi pemenang dalam pasar global. Pada tingkat dunia dikenal adanya *General Agreement on Trade (GAT)*. Pada tingkat Asia adanya *Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA)*. Sedangkan pada tingkat lokal Asia Tenggara terdapat *Asean Free Trade Agreement (AFTA)* yang merupakan bagian dari kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Kebijakan pasar bebas baik di tingkat internasional maupun regional menjadi tantangan yang mau tidak mau akan menyebabkan ketatnya persaingan sumber daya manusia dalam pasar ekonomi bebas tersebut. Masyarakat dunia tidak punya pilihan lain selain harus mampu menyikapi dengan baik strategis kebijakan inijika tidak ingin tergerus dan terpinggirkan.

Keadaan pasar bebas ini tentu akan menimbulkan peluang dan ancaman bagi bangsa Indonesia. Peluang itu berupa makin mudahnya barang dan jasa produksi Indonesia untuk memasuki pasaran luar negeri. Hambatan non-tarif bagi produk Indonesia ke negara lain akan makin tidak berarti. Demikian pula, tenaga kerja Indonesia dapat bekerja dengan mudah di negeri asing tanpa hambatan peraturan imigrasi yang berarti. Namun, di sisi lain, keadaan itu juga menjadi ancaman bagi Indonesia dengan segala konsekuensinya: barang, jasa, dan tenaga kerja asing dengan mudahnya masuk ke Indonesia tanpahambatan. Maka yang terjadi adalah persaingan kualitas barang, jasa dan tenaga kerja dalam merebut pasar dalam negeri.

Tantangan pendidikan nasional bertambah dengan hadirnya perdagangan bebas. Karena pada era perdagangan bebas salah satu tantangannya adalah arus bebas tenaga kerja terampil lintas negara tidak terbandung. Jika sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan di Indonesia masih diliputi berbagai kelemahan baik pada aspek kompetensi, kualifikasi, produktivitas, dan kesejahteraan, maka mereka dapat tersisih dalam persaingan regional maupun global. Untuk itu, upaya pengembangan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan harus menyentuh sampai aspek yang paling fundamental dalam

perubahan kompetensi mereka. (Andi Prastowo, 2017).

Di sinilah persoalan yang dihadapi negara berkembang seperti Indonesia ini yang meniscayakan dilakukan penataan dan perubahan pendidikan nasional. Tantangannya adalah, mampukah bangsa Indonesia menghadapi persaingan pada pasar bebas seperti itu? Ataukah hanya akan menjadi penonton belaka dalam pentasperekonomian di negeri sendiri? Sedangkan untuk dapat ‘*survive*’ dalam era perdagangan bebas itu, suatu negara harus mempunyai SDM berkualitas, bermutu dan berdaya saing.

Salah satu dampak dari pasar bebas ini adalah mengenai wacana “impor” dosen asing di Indonesia telah meramaikan perdebatan pada dunia pendidikan Indonesia. (Republika, 2 Pebruari 2018). Kebijakan yang dikeluarkan Menristekdikti itu mengacu pada peraturan presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang tenaga kerja asing (TKA). Kebijakan pemerintah tersebut untuk mendatangkan tenaga pengajar asing bagi perguruan tinggi atau dosen, mendapat respon dari berbagai pihak.

Indonesia telah melewati seluruh fase revolusi industri, mulai dari revolusi industri jilid satu hingga revolusi industri 4.0 saat ini. Selama itu pula Indonesia belum mampu menjadi negara industri. Intelektual negeri ini yang sejatinya adalah SDM mumpuni, lebih banyak memarkirkan diri di luar di luar negeri. Mengapa? Sebab apresiasi negeri ini terhadap SDM handal utamanya di bidang industri, masih sangat kurang.

Brain drain yakni bermigrasinya para intelektual dalam negeri ke luar negeri adalah fenomena yang kian menggejala. Inipun menjadi pemantik atas pernyataan “Jika SDM Indonesia mumpuni, seharusnya kebijakan mengimpor dosen asing sebagai pengejawentahan kebijakan impor tenaga kerja asing, tidak perlu dilakukan”.

Dampak liberalisasi pendidikan tinggi sebagai bentuk penjajahan nyata, sesungguhnya tengah membayangi dunia pendidikan tinggi di negeri ini. Tanpa visi misi yang jelas, Indonesia hanya akan menjadi pemain minor dalam dunia pendidikan. Indonesia pun akan terus membonceng pada universitas kelas dunia, berkedok kerjasama perguruan tinggi asing, *world class professor*, serta publikasi jurnal terindex scopus, tanpa adanya kemandirian serta visi pelaksanaan pendidikan dan riset universitas dalam negeri.

Salah satu kebijakan pendidikan nasional (dimana pendidikan Islam menjadi subsistemnya) untuk menghadapi pasar bebas tersebut dengan

plus-minusnya adalah hadirnya kebijakan mengenai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Sutrisno dan Suyatno, (2015:71) KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 dan UU Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012).

Adapun dalam KKNI bidang pendidikan merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013).

KKNI ini diharapkan akan mengubah cara pandang orang terhadap kompetensi dosen dan mahasiswa. Tidak lagi melihat ijazah yang diperoleh, namun juga melihat pada kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas baik formal maupun nonformal atau informal.

Kelak keberadaan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dan Capaian Pembelajaran (CP) akan menjadi penting. Untuk itulah perguruan tinggi perlu segera merumuskan CP-nya agar mudah dielaborasi dalam pemilihan mata kuliah dan praktikum.

KKNI menjadi aspek penting dalam pendidikan tinggi untuk bersaing di dunia internasional. Lulusan perguruan tinggi harus memiliki kualifikasi yang khas, kompeten dan profesional untuk bisa diterima pasar. Karenanya perguruan tinggi penting untuk memperhatikan KKNI dalam evaluasi dan pengembangan kurikulum. Ketatnya persaingan global menuntut pendidikan tinggi Indonesia untuk berbenah. Ini menjadi *wake up call* untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan bersaing di dunia kerja pada pasar global.

Kebijakan Pendidikan Islam pada Era Revolusi Industri 4.0 (Disrupsi)

Perubahan dunia kini tengah memasuki era revolusi industri 4.0 atau revolusi industri dunia keempat atau era disrupsi. (Rhenald Kasali, 2017: 149) dimana teknologi informasi telah menjadi basis dalam kehidupan manusia. Sebuah era baru yang menekankan pada pola *digital economy*,

artificial intelligence, *big data*, *robotic*, dan sebagainya atau dikenal dengan fenomena *disruptive innovation*. Revolusi industri generasi keempat ini ditandai dengan kemunculan super komputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, editing genetik dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak.

Segala hal menjadi tanpa batas (*borderless*) dengan penggunaan daya komputasi dan data yang tidak terbatas, karena dipengaruhi oleh perkembangan internet dan teknologi digital yang masif sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin. Era ini juga akan mendisrupsi berbagai aktivitas manusia, termasuk di dalamnya bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta pendidikan tinggi.

Menristekdikti pada Pembukaan acara Rakernas Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (kemenristekdikti) Tahun 2018 menjelaskan bahwa terdapat lima elemen penting yang harus menjadi perhatian dan akan dilaksanakan oleh Kemenristekdikti untuk mendorong di era Revolusi Industri 4.0, yaitu:

1. Persiapan sistem pembelajaran yang lebih inovatif di perguruan tinggi seperti penyesuaian kurikulum pembelajaran, dan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam hal data *Information Technology* (IT), *Operational Technology* (OT), *Internet of Things* (IoT), dan *Big Data Analytic*, mengintegrasikan objek fisik, digital dan manusia untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang kompetitif dan terampil terutama dalam aspek data *literacy*, *technological literacy* and *human literacy*.
2. Rekonstruksi kebijakan kelembagaan pendidikan tinggi yang adaptif dan responsif terhadap revolusi industri 4.0 dalam mengembangkan transdisiplin ilmu dan program studi yang dibutuhkan. Selain itu, mulai diupayakannya program *Cyber University*, seperti sistem perkuliahan *distance learning*, sehingga mengurangi intensitas pertemuan dosen dan mahasiswa. *Cyber University* ini nantinya diharapkan menjadi solusi bagi anak bangsa di pelosok daerah untuk menjangkau pendidikan tinggi yang berkualitas.
3. Persiapan sumber daya manusia khususnya dosen dan peneliti serta perekayasa yang responsif, adaptif dan handal untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Selain itu, peremajaan sarana prasarana dan pembangunan infrastruktur pendidikan, riset,

dan inovasi juga perlu dilakukan untuk menopang kualitas pendidikan, riset, dan inovasi.

4. Terobosan dalam riset dan pengembangan yang mendukung Revolusi Industri 4.0 dan ekosistem riset dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan pengembangan di Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, Industri, dan Masyarakat.
5. Terobosan inovasi dan penguatan sistem inovasi untuk meningkatkan produktivitas industri dan meningkatkan perusahaan pemula berbasis teknologi.

Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mempersiapkan dan memetakan angkatan kerja dari lulusan pendidikan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Dunia kerja di era revolusi industri 4.0 merupakan integrasi pemanfaatan internet dengan lini produksi di dunia industri yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dan informasi. Karakteristik revolusi industri 4.0 ini meliputi digitalisasi, optimalisasi dan kustomisasi produksi, otomasi dan adaptasi, *human machine interaction*, *value added services and businesses*, *automatic data exchange and communication*, dan penggunaan teknologi internet.

Pola industri baru ini membawa dampak terciptanya jabatan dan keterampilan kerja baru dan hilangnya beberapa jabatan. Industri yang akan banyak berkembang pada revolusi industri baru ini. Tantangan tersebut meniscayakan kebijakan antisipatif melalui transformasi pasar kerja Indonesia dengan mempertimbangkan perubahan iklim bisnis dan industri, perubahan jabatan dan kebutuhan ketrampilan. Salah satu faktor yang penting adalah ketrampilan dan kompetensi yang harus tetap secara konsisten perlu ditingkatkan sesuai kebutuhan pasar kerja yang semakin berkembang pesat.

Oleh karena itu, dunia pendidikan dan dunia Industri perlu mengembangkan *Industrial transformation strategy* dengan mempertimbangkan perkembangan sektor ketenagakerjaan karena transformasi industri akan berhasil dengan adanya tenaga kerja yang kompeten. Berbicara masalah peningkatan kualitas SDM Indonesia, terdapat tiga hal yang menjadi perhatian. Yang pertama adalah kualitas SDM. Yaitu bagaimana memastikan agar kualitas dari SDM Indonesia ini sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sesuai dengan industri yang berbasis teknologi digital. Yang kedua, adalah masalah kuantitas pekerja atau SDM yang berkualitas dan kompeten serta sesuai kebutuhan industri. Yang ketiga lokasi yaitu masih kurang meratanya

sebaran SDM yang berkualitas terutama di daerah-daerah. Terkait dengan peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, pemerintah selaku regulator menekankan pentingnya masififikasi pelatihan kerja dan sertifikasi profesi yang sedang dilakukan pemerintah melalui pelatihan kerja di BLK dan program pemagangan.

Hadirnya *e-learning* telah memberi nuansa baru dan telah memfasilitasi perubahan pada era ini. Secara umum, *e-learning* dapat digambarkan sebagai sebuah pembelajaran yang dapat disampaikan melalui berbagai media elektronik seperti internet, intranet, extranet, satelit, audio, TV interaktif dan CD ROM. *E-learning* telah mendorong demokratisasi pengajaran dan proses pembelajaran dengan memberikan kendali yang lebih besar dalam pembelajaran kepada murid. Hal ini sangat sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional seperti termaktub dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa “pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”.

Secara umum, intervensi *e-learning* dalam proses pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi dua: komplementer dan substitusi. Yang pertama mengandaikan bahwa cara pembelajaran dengan pertemuan tatap-muka masih berjalan tetapi ditambah dengan model interaksi berbantuan TI, sedang yang kedua sebagian besar proses pembelajaran dilakukan berbantuan TI. Saat ini, regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah juga telah memfasilitasi pemanfaatan *e-learning* sebagai substitusi proses pembelajaran konvensional. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 107/U/2001 dengan jelas membuka koridor untuk menyelenggarakan pendidikan jarak jauh di mana *e-learning* dapat masuk memainkan peran.

Tantangan berikutnya terkait dampak bergulirnya revolusi industri 4.0 adalah wacana tentang kehadiran Perguruan Tinggi Asing di Indonesia telah memantik riuhnya perdebatan dalam dunia pendidikan kontemporer. Kebijakan pemerintah tersebut sebenarnya sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 12/2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang memang membuka pintu bagi kampus asing untuk beroperasi di Indonesia, seperti diatur dalam pasal 90 ayat (1). Bahwa “Perguruan Tinggi lembaga negara lain

dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah melalui UU tersebut, membuka pintu lebar masuknya perguruan tinggi asing (PTA) di Indonesia. Langkah pemerintah itu menimbulkan polemik hebat. Pro dan kontra mencuat tanpa ruang lingkup yang jelas. Itu terjadi karena tujuan pemerintah membuka cabang PTA belum terdefinisi detail. Pemerintah baru sebatas menyatakan, PTA hanya akan membuka program studi yang terkait *science, technology, engineering, and mathematics* (STEM). Itu pun belum disertai karakteristik STEM seperti apa yang dibutuhkan.

Dengan demikian, upaya menghadirkan negara lain dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia harus ditujukan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat. Jangan sampai kehadiran PT asing hanya menambah kesenjangan antara kelompok terdidik dan tidak terdidik. Hal yang harus dihindari adalah PT asing tidak boleh menjadikan Indonesia sebagai tempat ekspansi bisnis semata yang tidak menghiraukan nilai-nilai luhur tri dharma perguruan tinggi.

PENUTUP

Perubahan sosial secara garis besar merupakan suatu perubahan pola kelakuan, hubungan sosial, institusi-institusi dan struktur sosial dalam waktu tertentu dan perubahan selalu mengalami sebuah kapasitas. Di antara bentuk globalisasi dapat diamati dengan adanya perdagangan bebas dan revolusi industri dalam berbagai lini sosial, tidak terkecuali aspek pendidikan. Pendidikan seperti tidak lagi murni mengusung misi transfer keilmuan serta penanaman etika kepada peserta didik, namun mengalami perluasan fungsi sebagai alat strategis dalam meraup keuntungan (*profit oriented*). Dari perubahan sosial ini disikapi oleh pemerintah dengan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik dengan hadirnya, antara lain: Kurikulum 2013, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), *e-learning*, *cyber University* dan sebagainya untuk menjawab tantangan era globalisasi yang ditandai dengan pasar bebas dan revolusi industri 4.0.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Prastowo. "Perubahan Mindset Dan Kesiapan Guru Sekolah Dasar Dalam Persaingan Pendidikan Di Era MEA" Prosiding (2017).
- Arsy Afiana. "PENDIDIKAN ISLAM DAN PASAR BEBAS." *Tadbir Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. Pendidikan Islam dan Pasar Bebas (2015): 23.
- Azyumardi Azra. *Pendidikan, Islam, Tradisi Dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995.
- Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik. "Pengembangan IPTEK Dan Pendidikan Tinggi Di Era Revolusi Industri 4.0." *Kemenrtrian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia*, 2018.
<https://ristekdikti.go.id/pengembangan-ipitek-dan-pendidikan-tinggi-di-era-revolusi-industri-4-0/>.
- Fathul, Wahid. "Pemberdayaan Pendidikan Islam Merespon Perkembangan Teknologi Informasi." *Jurnal El Tarbawi (Jurnal Pendidikan Islam)* I, no. 1 (2008): 71–82.
<http://www.journal.uui.ac.id/index.php/JPI/article/viewFile/189/178>.
- Elba Damhuri, *Polemik Perguruan Tinggi Asing* dalam <http://republika.co.id/berita/kolom/wacana/18/02/03/p3k6u2440-polemik-perguruan-tinggi-asing>. Diakses tanggal 20 April 2018.
- Giddens, Anthony. *Runaway World: How Globalization Is Reshaping Our Lives*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- H.A.R. Tilaar. *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998.
- Haidar Putra Daulay. *Pemberdayaan Pendidikan Islam Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Mustofa, Ghufron. "Pendidikan Islam Dalam Perubahan Sosial." *al-Qalam: Jurnal Kependidikan* 11, no. 1 (2013): 80–97.
http://al-qalam.unsiq.ac.id/index.php/al_qalam/article/view/24.
- Rhenald Kasali. *Disruption*. I. Jakarta: PT. Gramedia, 2017.
- Shaifudin, Arif. "PERAN STRATEGIS PENDIDIKAN ISLAM DI ERA GLOBALISASI." *Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman* 6, no. September (2016):

224.

Suradi, A. "Globalisasi Dan Respon Pendidikan Agama Islam Di Sekolah." *Jurnal Mudarrisuna* 7, no. Juli-Desember (2017): 247–266.

Suyatno, Sutrisno dan. *Pendidikan Islam Di Era Peradaban Modern*. I. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.

[Tribunnews.com](http://www.tribunnews.com) ,Era Revolusi Industri 4.0 Harus Diantisipasi Perguruan Tinggi, <http://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2018/02/11/era-revolusi-industri-40-harus-diantisipasi-perguruan-tinggi>

William Fielding Ogburn. *Social Change with Respect to Culture and Original Nature*. CHIZINE PUBN, 2018.